

Dampak Investasi Nikel China Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Pembangunan Berkelanjutan dan Ekonomi Politik Hijau

**Helga Yohana Simatupang
Diah Ayu Wulandari**

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia

e-mail: helgayohana.fisip@upnjatim.ac.id
diahayu.fisip@upnjatim.ac.id

ABSTRACT

From the standpoint of sustainable development and green political economy, this study examines the effects of Chinese nickel investment in Indonesia. This study assesses how these investments affect politics, the economy, society, and the environment using qualitative methodologies and literature reviews. The primary conclusions demonstrate that Chinese nickel investment significantly boosts Indonesia's economy through exports, employment creation, and technology transfer. But there are also drawbacks, such as environmental harm, social unrest, and economic reliance, which need to be addressed. In order to reduce the adverse effects of investment, this study emphasizes the significance of enforcing stringent environmental regulations, boosting community involvement locally, and using green technology within the framework of sustainable development. Under the newly elected Indonesian president in 2024, the country's chances for Chinese nickel investment will be heavily influenced by geopolitical trends, government policies that encourage foreign investment, environmental effect mitigation, and strategic bilateral relationship management. In the end, while these investments provide significant economic opportunity, sustainability initiatives must be addressed to ensure long-term benefits for Indonesia.

Keywords: Nickel, Indonesia, China Sustainable Development, Green Political Economy

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis dampak investasi nikel China di Indonesia dari perspektif pembangunan berkelanjutan dan ekonomi politik hijau. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka, penelitian ini mengevaluasi dampak politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dihasilkan dari investasi tersebut. Temuan utama menunjukkan bahwa investasi nikel China memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan ekonomi Indonesia, termasuk ekspor, penciptaan lapangan kerja, dan transfer teknologi. Namun, dampak negatif berupa kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan ketergantungan ekonomi juga menjadi tantangan yang harus dihadapi. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, penelitian ini menyoroti pentingnya penerapan regulasi lingkungan yang ketat, peningkatan partisipasi masyarakat lokal, dan integrasi teknologi hijau untuk meminimalkan dampak negatif investasi. Prospek investasi nikel China di Indonesia pada kepemimpinan presiden baru Indonesia di tahun 2024 akan sangat tergantung pada kebijakan pemerintah yang mendukung investasi asing, mitigasi dampak lingkungan, pengelolaan hubungan bilateral secara strategis, serta tren geopolitik. Pada akhirnya, meskipun investasi ini membawa peluang ekonomi besar, upaya keberlanjutan harus diprioritaskan untuk memastikan manfaat jangka panjang bagi Indonesia.

Kata Kunci: Nikel, Indonesia, China, Pembangunan Berkelanjutan, Ekonomi Politik Hijau

Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, di antaranya nikel. Sumber daya ini semakin penting di kancah global, seiring dengan meningkatnya kebutuhan terhadap teknologi baterai, terutama untuk kendaraan listrik, perangkat elektronik, dan energi terbarukan. Dalam beberapa tahun terakhir, potensi nikel yang besar ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu pemasok utama bijih nikel di dunia, sekaligus menarik perhatian berbagai investor asing, khususnya dari China, untuk berinvestasi di sektor pertambangan nikel di Indonesia. Pemerintah Indonesia berambisi untuk menjadikan Indonesia sebagai “Raja Baterai Dunia” melalui hilirisasi nikel. Indonesia telah melakukan pelarangan ekspor bijih nikel sejak 1 Januari 2020 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019. Langkah ini kemudian menuai gugatan Uni Eropa melalui *World Trade Organization (WTO)* yang menentang keputusan Indonesia untuk berhenti ekspor nikel, sedangkan industri nikel di Indonesia memang belum siap. Dalam gugatan tersebut, Uni Eropa menyoroti beberapa isu, termasuk pembatasan ekspor dan kewajiban pengolahan nikel di dalam negeri. Uni Eropa mengajukan gugatan kepada WTO terkait larangan ekspor bijih nikel Indonesia yang dianggap merugikan industri nikel negara-negara Uni Eropa (Center for World Trade Studies UGM, 2022) yang akhirnya membuat Presiden Indonesia, Joko Widodo, mengambil kebijakan untuk menghentikan ekspor bijih nikel ke Uni Eropa sejak tahun 2020 hingga sekarang.

Kebijakan tersebut diambil dengan mempertimbangkan bahwa nilai ekspor akan lebih menguntungkan apabila bijih nikel diubah menjadi komoditas yang lebih bernilai (Putra, 2022). Tujuan dari kebijakan pemberlakuan larangan ekspor bijih nikel oleh Indonesia ini adalah upaya Indonesia untuk pengembangan industri hilir, supaya sumber daya nikel bisa diolah di dalam negeri untuk menghasilkan produk setengah jadi dan produk jadi olahan nikel. Kalah gugatan di WTO justru mendorong Presiden Indonesia menginstruksikan percepatan hilirisasi nikel. Instruksi ini mengubah peta investasi dan mendorong target investasi pada hilirisasi nikel hingga produksi baterai mencapai USD 6 miliar atau mendekati Rp 90 triliun. Pemerintah Indonesia sendiri telah mengeluarkan kebijakan untuk mengendalikan ekspor bijih mentah dan memfasilitasi pembangunan smelter sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Selama ini, sebagian besar penanaman modal asing (PMA) masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan saat ini sektor hilirisasi menjadi kontributor utama dalam peningkatan investasi asing. Secara spasial, hilirisasi juga mendorong investasi lebih berkualitas dan mendorong industrialisasi di Indonesia Timur (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, 2023).

Namun, di sisi lain, kegiatan tambang dan pengolahan nikel juga membawa potensi kerusakan lingkungan, perubahan tata guna lahan, serta dampak sosial terhadap masyarakat lokal, terutama di kawasan Indonesia Timur yang kaya akan sumber daya nikel. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, sangat penting untuk mengevaluasi keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial. Melalui perspektif ini, penelitian tentang dampak investasi nikel dari China di Indonesia ditinjau dari perspektif pembangunan berkelanjutan dan ekonomi politik hijau menjadi sangat relevan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana investasi tersebut dapat berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap dampak investasi nikel China dari perspektif pembangunan berkelanjutan dan

ekonomi politik hijau menjadi penting untuk memahami sejauh mana investasi ini memberikan manfaat jangka panjang tanpa mengorbankan kepentingan lingkungan dan masyarakat lokal, serta keberlanjutan lingkungan dalam konteks kebijakan. Dengan meninjau aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang komprehensif mengenai dampak investasi nikel China di Indonesia dan relevansinya terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan di masa depan.

Riset terdahulu terkait kerjasama nikel China-Indonesia menggambarkan bahwa kerja sama yang terjadi antara Indonesia dan China dalam proyek investasi nikel berdampak pada adanya saling ketergantungan antara kedua negara baik dalam hal produksi dan distribusi nikel. Kerja sama tersebut juga berdampak pada meningkatnya pendapatan kedua negara, jumlah investasi yang masuk ke Indonesia serta ketersediaan lapangan pekerjaan. Di sisi lain, China juga memperoleh keuntungan dari adanya kerja sama ini terutama dalam jumlah pasokan bahan baku nikel dan kepentingan industri manufaktur (Fauziyyah dan Paksi, 2023). Riset lain menunjukkan bahwa kerja sama nikel antara Indonesia-China berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama dalam hal peningkatan lapangan kerja, pengembangan sumber daya manusia, dan pengembangan infrastruktur. Namun, hal ini juga menghadirkan tantangan baru dalam isu-isu lingkungan. Upaya Indonesia untuk mengatasi masalah lingkungan yang berasal dari industri nikel melibatkan tekanan kepada China, sebagai investor, untuk mematuhi standar lingkungan di kawasan pertambangan (Rosada et al., 2023)

Ketika penelitian terdahulu fokus terhadap efek investasi nikel China di Indonesia terhadap aspek ekonomi dan lingkungan, penelitian ini berfokus pada analisis efek investasi nikel China di Indonesia dalam perspektif pembangunan berkelanjutan sebagai pendekatan yang lebih holistik. Penelitian ini berupaya untuk menganalisis sejauh mana investasi China di Indonesia bidang nikel memberikan manfaat bagi pembangunan jangka panjang tanpa mengorbankan kepentingan lingkungan, ekonomi, dan masyarakat lokal. Dengan demikian, dapat dianalisis kompleksnya interaksi antara faktor-faktor ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam konteks investasi nikel, sehingga dapat merumuskan strategi yang lebih efektif untuk mengoptimalkan kebermanfaatan investasi tersebut.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami secara komprehensif dampak dari investasi nikel terhadap keberlanjutan lingkungan, ekonomi, dan sosial di Indonesia. Dengan meningkatnya perhatian global terhadap isu-isu lingkungan dan keberlanjutan, penting bagi Indonesia untuk mengevaluasi kembali strategi investasinya, terutama dalam konteks ketergantungan pada modal asing. Setelah menganalisis efek investasi nikel China di Indonesia menggunakan perspektif pembangunan berkelanjutan, penelitian ini berupaya untuk memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai bagaimana kebijakan investasi dapat diselaraskan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, serta untuk mengidentifikasi langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk mengurangi risiko lingkungan dan sosial yang mungkin muncul akibat kerjasama Indonesia-China. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan investasi yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan di masa depan.

Metode

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Menggunakan metode kualitatif memungkinkan para peneliti untuk mengeksplorasi, mendeskripsikan, dan

menjelaskan fenomena sosial (Leavy, 2017). Metode ini digunakan untuk menganalisis bagaimana dampak investasi nikel China di Indonesia ditinjau dalam perspektif pembangunan berkelanjutan. Data yang disajikan dalam penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber meliputi buku, situs web resmi, jurnal, dan artikel. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, peneliti menggunakan studi pustaka. Studi pustaka ini tidak hanya membantu memahami konteks yang ada untuk menjawab pertanyaan penelitian, tetapi juga memberikan referensi teoritis dan pragmatis untuk menganalisis fenomena yang dikaji. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan baru terkait hubungan antara investasi nikel dan keberlanjutan pembangunan di Indonesia.

Untuk menganalisis data dari berbagai sumber, penelitian ini menggunakan proses induktif dari penelitian kualitatif. Proses induktif yang menjadi ciri khas analisis data kualitatif melibatkan mengajukan pertanyaan terhadap data yang mendalam dan luas yang telah dihasilkan dari berbagai sumber mengenai fenomena tersebut (Ravindran, 2019). Berbagai data dan informasi terkait kerja sama maritim Indonesia-China, termasuk aspek keberlanjutan ekonomi dan lingkungan dalam penelitian ini dijelaskan secara kualitatif dan dianalisis menggunakan kerangka teoritis pembangunan berkelanjutan. Setelah itu, kesimpulan ditarik dari diskusi saat proses induktif dilakukan dalam penelitian kualitatif.

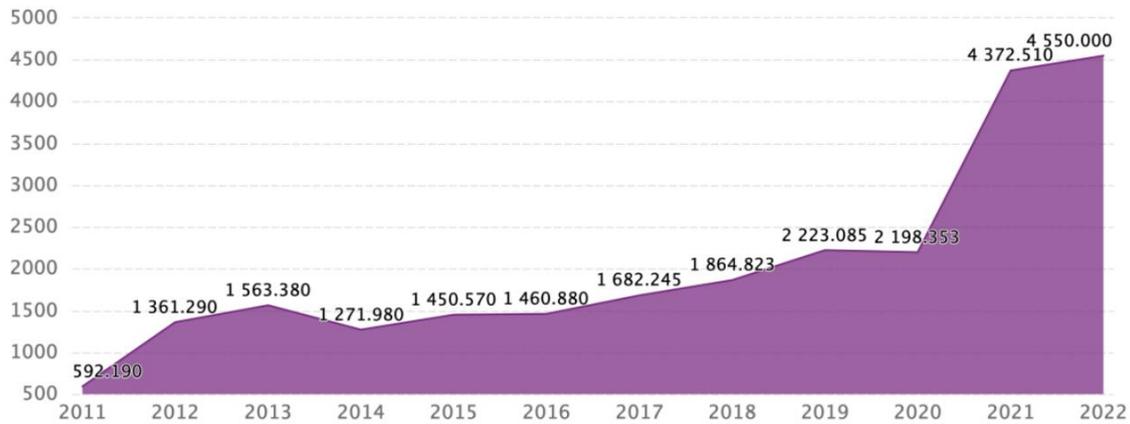
Lebih lanjut, penelitian ini berupaya untuk menganalisis bagaimana dampak investasi nikel China di Indonesia dengan menggunakan perspektif pembangunan berkelanjutan kemudian dikaitkan dengan konsep ekonomi politik hijau yang berfokus pada perubahan struktural yang melibatkan hubungan kekuasaan, pengelolaan sumber daya, dan keadilan lingkungan. Proses analisis meliputi penyaringan data, dimana penulis menyaring informasi yang relevan untuk memastikan bahwa data dan informasi yang digunakan merupakan data dan informasi yang akuntabel. Selanjutnya yakni interpretasi, data serta informasi yang telah disaring kemudian diinterpretasikan dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan ekonomi politik hijau. Penulis berusaha memahami bagaimana investasi nikel dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi sekaligus mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan. Langkah terakhir yakni penyusunan temuan, temuan dari analisis data disusun dalam bentuk narasi yang menggambarkan dampak investasi nikel China di Indonesia dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Hasil dan Pembahasan

Sejarah Hubungan Bilateral Indonesia-China Dalam Bidang Perdagangan Dan Investasi

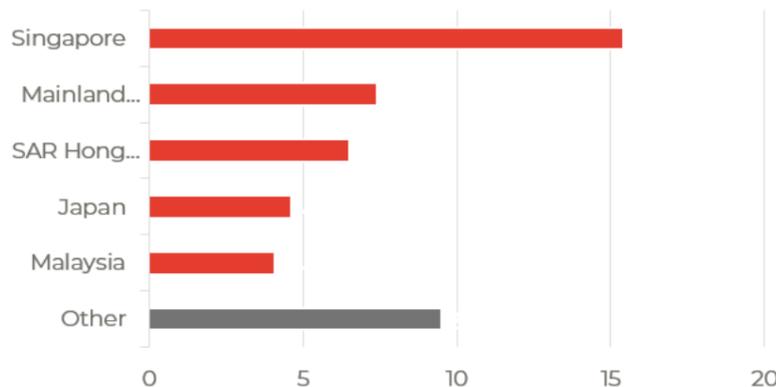
Hubungan diplomatik Indonesia-China mengalami dinamika yang fluktuatif. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Indonesia menjalin hubungan bilateral yang erat dengan China melalui penandatanganan perjanjian persahabatan pada tahun 1961. Sementara itu, hubungan diplomatik antara kedua negara mengalami kemunduran selama kepemimpinan Presiden Soeharto akibat penyebaran isu-isu komunis pada tahun 1967. Hal tersebut yang menyebabkan pembekuan hubungan Indonesia-Tiongkok. Normalisasi hubungan dilakukan pada tahun 1990, yang didorong oleh adanya faktor-faktor ekonomi dan krisis ekonomi di Indonesia (Freindensan, 2017). Di era para pemimpin Indonesia berikutnya, mulai dari Presiden Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, hingga era Joko Widodo, hubungan diplomatik antara keduanya terus meningkat melalui sektor ekonomi (Utami, 2015). Dengan demikian, dapat dilihat bahwa meskipun Indonesia dan China telah mengalami

masa lalu yang sulit, Indonesia dan China mampu mempertahankan hubungan bilateral antara kedua negara (Wulandari dan Inayah, 2021).



Gambar 1: Investasi Luar Negeri China Ke Indonesia Dalam Juta US\$
 Sumber: CEIC Data, 2023

Mengenai kemitraan Indonesia-China, China merupakan salah satu investor terbesar di Indonesia dengan kuantitas investasi yang cenderung meningkat tiap tahunnya. Data tahun 2023 dari CEIC Data, perusahaan berbasis data yang didirikan di Hongkong menunjukkan lonjakan tahunan investasi China di Indonesia dari tahun ke tahun (CEIC, 2023). Mengutip dari website Griffith University Australia, Bidang utama investasi China di Indonesia meliputi infrastruktur, teknologi, logam, dan pertambangan. Dalam konteks umum di Asia, keterlibatan Tiongkok dalam logam dan pertambangan pada tahun 2022 mencapai USD 5,3 miliar. Indonesia menjadi fokus utama investasi Tiongkok di kawasan Asia-Pasifik. Yang mana nikel menjadi salah satu bidang utama investasi China ke Indonesia. Hal tersebut diwujudkan dengan investasi integrasi vertikal oleh produsen baterai terbesar di dunia CATL, yang membeli saham konsesi pertambangan nikel di Indonesia dari PT Aneka Tambang Tbk (Antam). Taiyuan Iron & Steel Group (TISCO), anak perusahaan China Baowu Steel Group (Baowu), dan Shandong Xinhai Technology (Xinhai) dalam usaha patungan dengan PT Vale telah memulai pembangunan proyek penambangan dan pemrosesan nikel rendah karbon terintegrasi senilai USD 2,48 miliar di Sulawesi Tengah. Yang lainnya adalah pabrik foil tembaga di Indonesia oleh Zhejiang Hailiang (Griffith Asia Institute, 2024).



Gambar 2. Top 5 Investor Asing Di Indonesia Tahun 2023 Dalam Miliar US\$
 Sumber: ARC Group, 2024

Dampak Investasi Nikel China Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Pembangunan Berkelanjutan dan Ekonomi Politik Hijau

Data tahun 2024 dari ARC Group, ARC Group adalah perusahaan layanan keuangan dan penasihat global dengan fokus pada keuangan Asia, Amerika, dan Eropa. ARC didirikan tahun 2015 dengan markas di 11 negara pada tahun 2024. Data dari ARC Group menunjukkan bahwa China merupakan investor terbesar kedua di Indonesia setelah Singapura (ARC Grup, 2024). Pada tahun 2023, jumlah investasi China di Indonesia mencapai USD 7,3 Miliar. Dari sisi China pada tahun 2023,, Indonesia menjadi penerima investasi tunggal terbesar dengan investasi sekitar USD 7,3 miliar, diikuti oleh Malaysia (USD 2,7 miliar), Singapura (USD 2,6 miliar), dan Korea Selatan (USD 2,3 miliar). Besarnya investasi China ke Indonesia berkaitan dengan kedekatan Chin-Indonesia serta beragamanya kerjasama bilateral yang sudah terlaksana oleh kedua negara tersebut.

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023	Trend (%) 2019 - 2023	Perub (%) 2023 - 2022	Peran (%) 2023	Jan-Agu 2023 2024		Perub (%) 2024/ 2023
NONMIGAS	155,893.7	154,940.8	219,362.1	275,906.1	242,852.5	15.76	-11.98	100.00	161,112.5	160,240.1	-0.54
REP.RAKYAT CINA	25,894.3	29,936.4	51,088.9	63,461.7	62,329.5	28.51	-1.78	25.67	40,213.0	37,185.6	-7.53
AMERIKA SERIKAT	17,806.1	18,622.4	25,792.8	28,182.7	23,230.3	9.92	-17.57	9.57	15,566.2	16,952.0	8.90
INDIA	11,700.6	10,179.0	13,112.6	23,285.7	20,280.1	21.26	-12.91	8.35	13,070.1	13,918.7	6.49
JEPANG	13,814.4	12,885.3	16,894.3	23,199.4	18,884.4	12.90	-18.60	7.78	12,982.0	12,636.0	-2.67
PILIPINA	6,754.5	5,858.5	8,601.9	12,900.9	11,036.5	19.38	-14.45	4.54	7,373.3	6,940.0	-5.88

Gambar 3. Perkembangan Ekspor Non-Migas Indonesia 2023-2024 Berdasarkan Prioritas Negara Dalam Juta US\$

Sumber: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2024

Selanjutnya, terkait hubungan dagang Indonesia dan China, China merupakan mitra dagang terbesar Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan China menjadi tujuan prioritas pertama ekspor Indonesia. Data dari Kementerian perdagangan Republik Indonesia menunjukkan dinamika ekspor non-migas Indonesia ke berbagai negara pada tahun 2023 dan 2024. Pada dua tahun terakhir, China menjadi negara dengan kuantitas ekspor terbesar dilanjutkan dengan Amerika Serikat sebagai prioritas kedua Indonesia dalam mengeksport komoditi Non-migas yang mana nikel termasuk dalam salah satu komoditi non-migas (Kemendag RI, 2024). Besaran kuantitas ekspor Indonesia ke China menunjukkan eratnya kerjasama ekonomi Indonesia-China.

Berdasarkan data tersebut, hubungan bilateral Indonesia-China dalam bidang perdagangan dan investasi menunjukkan perkembangan yang signifikan dan saling menguntungkan. China menjadi mitra dagang terbesar Indonesia, dengan posisinya sebagai tujuan ekspor utama untuk komoditas non-migas Indonesia, termasuk nikel. Hal ini mencerminkan ketergantungan ekonomi yang semakin meningkat antara kedua negara, di mana China menjadi pasar utama bagi produk-produk Indonesia. Sementara itu, dari sisi investasi, China konsisten menjadi salah satu investor terbesar di Indonesia, dengan fokus pada sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, teknologi, logam, dan pertambangan. Investasi China yang mencapai USD 7,3 miliar pada tahun 2023 menunjukkan kepercayaan yang tinggi terhadap potensi ekonomi Indonesia.

Perkembangan hubungan ekonomi ini tidak terlepas dari dinamika hubungan diplomatik yang telah melalui berbagai fase sejak era Soekarno hingga Joko Widodo. Meskipun pernah mengalami masa sulit, kedua negara berhasil menormalisasi hubungan dan terus meningkatkan kerja sama ekonomi. Investasi China yang berfokus

pada sektor-sektor strategis, seperti proyek nikel terintegrasi di Sulawesi Tengah, menunjukkan adanya sinergi antara kebutuhan pembangunan Indonesia dan strategi ekspansi ekonomi China. Hal ini mencerminkan bahwa hubungan bilateral kedua negara telah berkembang menjadi kemitraan strategis yang saling melengkapi, di mana Indonesia mendapatkan modal dan teknologi, sementara China memperoleh akses terhadap sumber daya alam dan pasar yang besar.

Sejarah dan Perkembangan Investasi Nikel China Di Indonesia

Saat Presiden Joko Widodo resmi dilantik pada Oktober 2014, ia mewarisi kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang melarang ekspor mineral mentah, termasuk bijih nikel dan bauksit, sejak awal tahun itu demi alasan menggenjot industri pengolahan domestik. Pemerintahan Jokowi mengklaim nikel sebagai contoh sukses hilirisasi yang diproyeksikan membuat Indonesia “melompat” jadi negara maju. Mempertimbangkan tren penggunaan kendaraan listrik global dan tekanan mengurangi emisi karbon, pemerintahan Jokowi membuka pintu lebar-lebar bagi investasi untuk mengembangkan operasi tambang dan pengolahan nikel domestik, apalagi pasokan nikel Indonesia berlimpah. Selain itu, Indonesia memutuskan untuk mengabaikan keputusan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang menentang kebijakan ekspor nikel mentah, demi menjaga hubungan strategis dengan Tiongkok. Langkah ini memperkuat posisi tawar Indonesia dalam diplomasi internasional, meningkatkan kemampuannya untuk menghadapi tekanan dari negara-negara Barat, serta memungkinkan negosiasi perjanjian perdagangan yang lebih menguntungkan (Rosada, 2024).

Perhitungan jumlah sumber daya dan cadangan nikel terbagi jadi dua yaitu bijih dan logam. Cadangan komoditas nikel di Indonesia masih menjadi yang terbesar di dunia atau setara dengan 23% cadangan di dunia. Total, Indonesia memiliki sumber daya nikel mencapai 17,7 miliar ton bijih dan 177,8 juta ton logam, dengan jumlah cadangan 5,2 miliar ton bijih dan 57 juta ton logam. Selain itu, terdapat beberapa wilayah yang memiliki kandungan nikel, namun belum dieksplorasi (*greenfield*) yang tersebar di Provinsi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2023). Pasokan nikel Indonesia yang terpusat di Pulau Sulawesi ini mem cadangan mencapai 54,7% dari angka total Indonesia. Lumbung nikel kedua terbesar adalah Pulau Halmahera (Maluku Utara) dengan 44,6%. Melihat kondisi itu, para pemodal lokal dan asing berbondong-bondong datang ke kawasan tersebut untuk menambang atau membangun berbagai pabrik pengolahan nikel. Menariknya, keuntungan dari aliran pembiayaan ini kembali ke negara asal investornya, yaitu China, sehingga efek berganda nikel di Indonesia sejatinya hanya bersifat semu.

Dalam mendukung perkembangan industri nikel yang terintegrasi maka pemerintah akan meningkatkan hilirisasi nikel dalam negeri yang salah satunya dengan peningkatan jumlah smelter. Pemerintah menargetkan pembangunan 53 smelter hingga tahun 2024, dimana pada 2021 terdapat 19 smelter telah berdiri dengan tambahan 4 smelter ditargetkan rampung pada akhir tahun (Santika, 2023). Pemerintah menarik investasi bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya nikel untuk kemakmuran bangsa melalui rantai pengolahan dalam negeri. Pemerintah Indonesia juga membuka kesempatan berikut juga dengan memberikan kemudahan dari segi perizinan dan juga fasilitas-fasilitas kepada investor terkait penanaman modal baik itu dari dalam negeri maupun asing. Saat ini Indonesia masih membutuhkan pendanaan terkait pembangunan smelter (pemurnian), pembangunan PLTU sebagai penggerak utama dari mesin pengolah nikel, tenaga ahli serta pelatihan sumber daya manusia yang dapat mengoperasikan pengolahan nikel dengan baik yang tentunya membutuhkan dana yang sangat banyak.

Dalam rangka percepatan ekonomi dan pembangunan, pemerintah telah mengambil langkah yang tepat dengan mewajibkan semua perusahaan tambang di Indonesia untuk mengolah hasil tambang dan melarang ekspor bahan mentah guna menaikkan harga pasar di internasional dan menambah devisa negara dengan kedepannya lebih meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan.

Investasi Nikel China Di Indonesia Era Presiden Joko Widodo

Indonesia merupakan mitra strategis untuk China. Sebaliknya, China merupakan mitra dagang terbesar Indonesia. Hal tersebut diperkuat ketika Presiden China Xi Jinping mengumumkan Jalur Sutra Maritim Abad ke-21 dalam pidatonya di Parlemen Indonesia di Jakarta. Kuatnya hubungan bilateral kedua negara dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, letak geografis Indonesia diantara Samudra Hindia dan Pasifik serta Indonesia berbatasan dengan bagian selatan Laut Cina Selatan menjadi faktor pendukung kedekatan kedua negara tersebut. Kedua, Pasar domestik Indonesia yang besar, muda, dan berkembang serta sumber daya alamnya yang luas dan sebagian besar belum dimanfaatkan menjadikannya pasar yang menarik bagi perusahaan-perusahaan Tiongkok untuk berinvestasi.

Indonesia sendiri menerima dengan baik investasi dari China terkait kebutuhan investasi guna melancarkan pembangunan infrastruktur serta pengolahan sumber daya alam, termasuk pengolahan nikel. Eratnya hubungan Indonesia dengan China tidak lepas dari kuatnya posisi tawar kedua negara dalam ranah bilateral. Peran besar Indonesia dalam Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) serta keanggotaan Indonesia dalam Group of Twenty (G-20) mendorong semakin luasnya kerjasama Indonesia-China dari waktu ke waktu. Begitupun dengan bidang investasi, kedekatan Indonesia-China berdampak pada besarnya investasi China untuk Indonesia.

Apabila ditinjau dalam perspektif investasi nikel, investasi nikel China di Indonesia pada masa Presiden Joko Widodo bermuara pada upaya hilirisasi yang menjadi upaya kinerja pemerintah. Hilirisasi nikel di Indonesia telah menjadi langkah strategis yang diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam yang melimpah. Indonesia memiliki cadangan bijih nikel yang signifikan, dengan total sumber daya bijih nikel mencapai sekitar 11,9 miliar ton dan cadangan bijih sebesar 4,3 miliar ton (Kementerian ESDM, 2020). Kebijakan hilir ini didorong oleh kebutuhan untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor bijih mentah, yang sering rentan terhadap fluktuasi harga global. Dengan mengolah nikel menjadi produk setengah jadi atau jadi seperti ferronickel dan Nickel Pig Iron (NPI), Indonesia tidak hanya dapat meningkatkan pendapatan negara dari pajak dan pendapatan negara bukan pajak (PNBP), tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan industri dalam negeri (BPMI Setpres, 2024).

Statistik investasi nikel China di Indonesia selama era Presiden Joko Widodo menunjukkan tren yang signifikan, terutama setelah penerapan kebijakan hilirisasi yang dimulai pada tahun 2020. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong pengolahan nikel di dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bijih mentah. Data menunjukkan bahwa China menjadi investor dominan dalam sektor nikel, dengan sekitar 90% dari pabrik hilirisasi nikel di Indonesia dikelola oleh perusahaan-perusahaan asal China. Investasi ini tidak hanya mencakup pembangunan smelter dan fasilitas pengolahan, tetapi juga mencakup proyek-proyek besar seperti Kawasan Industri Morowali yang menjadi pusat kegiatan industri nikel di Sulawesi (Muliawati, 2023).

Investasi nikel dari China di Indonesia mencakup pengembangan hilirisasi nikel di Indonesia. Bahkan dari 248 tungku smelter nikel di Indonesia, 137 tungku terafiliasi investor China. Investasi China di Indonesia diinvestasikan dalam bentuk modal pengembangan hilirisasi di Sulawesi, Halmahera, atau Maluku Utara (Gading, 2024). Perkembangan terbaru terkait investasi China di Indonesia pada bidang nikel yakni kerjasama antara PT Vale Indonesia Tbk (INCO) dan GEM Co Ltd di Beijing, China dalam kunjungannya untuk memperkuat hubungan bisnis antara Indonesia dan China. Penandatanganan kolaborasi strategis antara kedua pihak tersebut dihadiri langsung oleh Presiden Indonesia, Prabowo Subianto (Metriani, 2024).

Kolaborasi antara PT Vale Indonesia Tbk (INCO) dan GEM Co Ltd di Beijing tersebut bernilai US\$ 1,4 miliar dengan teknologi High-Pressure Acid Leaching (HPAL). Pelaksanaan kerjasama tersebut akan berlokasi di Sulawesi Tengah, dengan tujuan yang akan dicapai yakni untuk menjadi pabrik pengolahan nikel *net-zero*, dengan produksi setidaknya 60.000 ton nikel dalam bentuk Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) setiap tahun—komponen penting untuk baterai sistem penyimpanan energi (ESS). Investasi ini mencakup pengembangan pusat penelitian dan pengembangan sebesar US\$ 40 juta untuk transfer pengetahuan dan pengembangan talenta lokal Indonesia, US\$ 30 juta untuk ESG Compound yang mencakup lanskap hijau, asrama karyawan, suplai air domestik, dan pengolahan limbah, serta US\$ 10 juta untuk komitmen pembangunan masyarakat dan fasilitas umum (Metriani, 2024).

Kerjasama pengolahan nikel antara Indonesia dan Tiongkok menandai tonggak penting dalam upaya kedua negara untuk memaksimalkan manfaat ekonomi sekaligus mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Indonesia yang kaya akan cadangan nikel mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan nilai sumber daya alamnya melalui langkah-langkah hilirisasi. Di sisi lain, China adalah mitra dagang terbesar Indonesia dan merupakan investasi besar di sektor ini. Kemitraan Indonesia-China di bidang nikel tidak hanya berfokus pada ekstraksi sumber daya tetapi juga pada pengembangan pengolahan nikel yang lebih mengutamakan aspek berkelanjutan, seperti yang digambarkan oleh proyek bersama senilai total USD 1,4 miliar antara PT Vale Indonesia Tbk (INCO) dan GEM Co Ltd. Upaya maksimal kedua negara dalam kolaborasi ini tercermin dari berbagai aspek kerjasama yang tidak hanya mencakup investasi finansial, tetapi juga transfer teknologi dan pengembangan sumber daya manusia. Proyek HPAL di Sulawesi Tengah, misalnya, tidak hanya bertujuan untuk memproduksi 60.000 ton nikel dalam bentuk MHP per tahun, tetapi juga berkomitmen untuk menjadi pabrik pengolahan nikel *net-zero* (Syaharani, 2024).

Dalam menjalankan strategi Poros Maritim Global, Indonesia juga berupaya memperkuat konektivitas maritim, yaitu dengan mengembangkan konektivitas antar pulau seiring dengan rencana Indonesia untuk memperluas pelabuhan laut serta meningkatkan infrastruktur pelabuhan demi pembangunan ekonomi (Simatupang, 2023). Pembangunan pelabuhan laut juga dilakukan di Sulawesi untuk mendukung investasi nikel merupakan bagian dari upaya hilirisasi sumber daya alam Indonesia. Infrastruktur pelabuhan ini dirancang untuk mempercepat pengangkutan bahan mentah nikel dan produk olahan ke pasar internasional, sekaligus mendukung kebutuhan logistik dalam negeri. Proyek pelabuhan sering kali dikembangkan di kawasan-kawasan industri seperti Morowali dan Weda Bay, yang merupakan pusat kegiatan pengolahan dan ekspor nikel. Untuk memastikan manfaat pembangunan pelabuhan laut ini berkelanjutan, pemerintah perlu memperkuat regulasi terkait dampak lingkungan, melibatkan masyarakat lokal dalam proses perencanaan, serta mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam pengelolaan pelabuhan.

Dampak Investasi Nikel China Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Pembangunan Berkelanjutan dan Ekonomi Politik Hijau

Indonesia-China berusaha untuk menyelaraskan kepentingan ekonomi dengan tujuan keberlanjutan lingkungan. Melalui kolaborasi ini, Indonesia dan China berupaya untuk menciptakan model kerjasama yang saling menguntungkan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Indonesia mendapatkan keuntungan dari peningkatan nilai tambah sumber daya alam khususnya nikel, penciptaan lapangan kerja, dan transfer teknologi, sementara China memperoleh akses ke sumber daya strategis dan pasar yang berkembang. Di satu sisi, ekonomi sering kali mengutamakan pertumbuhan dan eksploitasi sumber daya untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan. Di sisi lain, keberlanjutan lingkungan mengharuskan adanya batasan pada eksploitasi tersebut untuk menjaga ekosistem dan sumber daya bagi generasi mendatang. Namun, keduanya bukanlah hal yang sepenuhnya bertentangan. Dengan pendekatan yang tepat, lingkungan dan ekonomi dapat saling mendukung melalui konsep pembangunan berkelanjutan dan ekonomi politik hijau.

Investasi Nikel China Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Pembangunan Berkelanjutan dan Ekonomi Politik Hijau

Investasi nikel China di Indonesia telah meningkat pesat, terutama dalam konteks hilirisasi industri nikel. Dengan 137 dari 248 tungku smelter nikel di Indonesia terafiliasi dengan investor China, kontribusi ini mencerminkan dominasi modal Tiongkok dalam pengembangan sektor ini. Namun, pertumbuhan investasi ini juga memunculkan tantangan terkait keberlanjutan dan dampak lingkungan. Implementasi pembangunan berkelanjutan yang didukung dengan ekonomi politik hijau dalam investasi nikel China di Indonesia dapat dianalisis dengan memperhatikan dimensi ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan yang saling terkait.

Pembangunan Berkelanjutan

Konsep pembangunan berkelanjutan mengintegrasikan tiga pilar utama yang harus seimbang dalam setiap bentuk investasi, yaitu:

- 1) Ekonomi, yaitu investasi nikel dari China mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama dalam upaya menjadi pusat industri baterai global. Namun, penting untuk memastikan distribusi manfaat yang adil, termasuk bagi komunitas lokal.
- 2) Lingkungan, yaitu tambang nikel harus menerapkan prinsip *sustainable mining*, seperti reklamasi lahan dan konservasi keanekaragaman hayati di sekitar wilayah tambang.
- 3) Sosial, yaitu investasi ini harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat lokal melalui pembukaan lapangan kerja, pelatihan, dan pembangunan infrastruktur tanpa menimbulkan konflik sosial akibat pemindahan penduduk atau perusakan sumber daya lokal.

Ekonomi Politik Hijau

Konsep pembangunan berkelanjutan harus juga diintegrasikan dengan ekonomi politik hijau yang menekankan pentingnya membangun sistem ekonomi yang berbasis keberlanjutan, dengan mempertimbangkan dampak lingkungan dalam kebijakan atau keputusan investasi. Dalam konteks investasi nikel China di Indonesia, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu:

- 1) Manajemen lingkungan, yaitu pengelolaan tambang nikel harus memastikan minimnya kerusakan ekosistem melalui penerapan teknologi hijau seperti *tailings management* untuk mengurangi limbah.
- 2) Regulasi, yaitu peran pemerintah Indonesia sangat krusial dalam memastikan bahwa perusahaan China mematuhi standar lingkungan internasional seperti ISO 14001 dan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG).
- 3) Energi terbarukan, yaitu proses pengolahan nikel yang didukung oleh energi bersih, seperti tenaga surya atau hidro, dapat mengurangi jejak karbon dalam rantai produksi.

Perspektif pembangunan berkelanjutan berorientasi pada pencapaian keseimbangan antara ekonomi, lingkungan, dan sosial, sedangkan ekonomi politik hijau lebih menyoroti perubahan struktural yang diperlukan untuk mewujudkan keadilan lingkungan dan sosial. Integrasi keduanya dapat memberikan analisis yang lebih holistik terhadap tantangan pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks investasi nikel China di Indonesia, konsep ini memberikan kerangka untuk menganalisis bagaimana modal asing, kebijakan pemerintah, dan isu lingkungan berinteraksi, serta bagaimana praktik tersebut dapat diselaraskan dengan prinsip keberlanjutan. Indonesia sebagai penghasil utama nikel berada dalam posisi strategis untuk memimpin transisi global ke teknologi rendah karbon, tetapi berpotensi tersandera dalam "ekstraktivisme hijau" yang tetap eksploitatif terhadap sumber daya alam. Maka dari itu, pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap praktik pertambangan dan pengolahan nikel, termasuk evaluasi dampak lingkungan secara berkelanjutan.

Dampak Positif Investasi Nikel China Di Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan dan Ekonomi Politik Hijau

Investasi nikel China di Indonesia memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan di kedua negara. Pertama, investasi ini berkontribusi pada peningkatan ekspor nasional dan pendapatan daerah. Dengan berdirinya kawasan industri seperti PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) dan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Indonesia telah menjadi bagian dari rantai pasokan global, mengekspor produk olahan nikel ke berbagai negara, termasuk Amerika, Spanyol, Italia, India, Taiwan, dan Korea Selatan (Wijaya, 2020). Dampak dari kerjasama dalam bidang nikel antara Indonesia-China tidak hanya meningkatkan pendapatan negara tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru, yang penting untuk pertumbuhan ekonomi lokal.

Kerjasama bidang nikel Indonesia-China juga mencakup aspek pengembangan sumber daya manusia dan pendidikan. Misalnya, pembangunan Politeknik Industri Logam Morowali menunjukkan komitmen untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal dalam industri pengolahan nikel. Program pengiriman mahasiswa Indonesia ke China untuk mendalami teknologi dan manajemen industri juga merupakan upaya strategis yang mendukung transfer ilmu pengetahuan dan peningkatan kapasitas lokal (Wijaya, 2020). Dengan demikian, investasi China di Indonesia dalam bidang nikel tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi jangka pendek, tetapi juga pada pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan.

Selain itu, hilirisasi nikel di Indonesia sejalan dengan upaya global untuk mengurangi ketergantungan pada bahan mentah dan meningkatkan nilai tambah produk. Kebijakan hilirisasi yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia telah terbukti efektif dalam meningkatkan nilai ekspor nikel. Berdasarkan data tahun 2022 dari Kementerian Bidang Kemaritiman dan Investasi, nilai ekspor produk nikel hasil hilirisasi telah mencapai USD33,81 miliar atau Rp 504,2 triliun. Angka tersebut lebih besar 745% dari nilai ekspor pada 2017, ketika Indonesia hanya mengekspor bahan mentah berupa bijih nikel. Nilai ekspor nikel pada 2017 hanya sekitar USD4 miliar (Sutrisno, 2023). Ini menunjukkan bahwa investasi China dalam sektor nikel tidak hanya bermanfaat bagi perusahaan-perusahaan mereka, tetapi juga mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan Indonesia melalui peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan industri yang lebih ramah lingkungan.

Dalam konteks ekonomi politik hijau, investasi China di Indonesia dalam sektor nikel menunjukkan upaya untuk menyelaraskan praktik ramah lingkungan dalam proses

produksi. Meskipun investasi dan pengelolaan nikel ini menghadapi tantangan terkait dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan, kerjasama Indonesia-China membuka peluang bagi penerapan teknologi yang lebih bersih dan efisien. Proyek *High-Pressure Acid Leaching* (HPAL) yang dilaksanakan oleh PT Vale Indonesia Tbk dan GEM Co Ltd Beijing merupakan contoh nyata dari upaya untuk meminimalisir emisi karbon dan dampak lingkungan lainnya (Nurmutia, 2024). Dengan adanya tekanan serta dorongan dari pemerintah Indonesia untuk mematuhi standar lingkungan yang lebih ketat, perusahaan-perusahaan China didorong untuk menerapkan praktik bisnis yang lebih berkelanjutan.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, keberhasilan investasi nikel China di Indonesia dapat dilihat dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang disebabkan salah satunya karena hilirisasi nikel dan juga penggunaan teknologi yang berkelanjutan. Investasi China di sektor nikel mendorong penerapan teknologi yang lebih bersih dan efisien. Proyek *High-Pressure Acid Leaching* (HPAL) yang dilakukan oleh PT Vale Indonesia Tbk dan GEM Co Ltd Beijing adalah contoh nyata dari upaya untuk meminimalisir dampak lingkungan dari proses produksi nikel. Meskipun tantangan lingkungan tetap ada, kolaborasi ini membuka peluang bagi Indonesia untuk menerapkan praktik bisnis yang lebih berkelanjutan. Dengan regulasi yang mendukung prinsip-prinsip keberlanjutan, investasi nikel dapat berfungsi sebagai katalisator bagi transisi menuju ekonomi hijau di Indonesia, sekaligus memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan kesehatan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Selanjutnya, untuk memaksimalkan dampak positif dari investasi nikel China di Indonesia agar dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan, dibutuhkan regulasi yang menekankan pada integrasi prinsip-prinsip berkelanjutan dan ramah lingkungan dalam setiap aspek kerjasama. Pemerintah Indonesia harus terus memperkuat regulasi lingkungan dan mendorong perusahaan-perusahaan pengolahan nikel untuk mengadopsi praktik ramah lingkungan serta teknologi yang lebih efisien. Selain itu, kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam pengembangan, penelitian, serta proses pengolahan nikel harus ditingkatkan untuk menciptakan inovasi yang berkelanjutan dalam pengolahan nikel. Dengan langkah-langkah ini, investasi nikel dapat berfungsi sebagai katalisator bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendukung transisi menuju ekonomi hijau di Indonesia.

Dampak Negatif Investasi Nikel China Di Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan dan Ekonomi Politik Hijau

Investasi nikel China di Indonesia telah menimbulkan berbagai dampak negatif yang signifikan, terutama dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Meskipun pemerintah Indonesia berusaha untuk memanfaatkan potensi nikel sebagai sumber daya strategis, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak masalah muncul akibat investasi ini. Investasi nikel China di Indonesia, meskipun memberikan peluang ekonomi besar, juga menimbulkan berbagai dampak negatif dalam perspektif pembangunan berkelanjutan. Dampak ini dapat dianalisis berdasarkan tiga pilar utama: ekonomi, sosial, dan lingkungan.

1) Dampak Lingkungan

Aktivitas tambang nikel sering menyebabkan kerusakan lahan, deforestasi, dan hilangnya keanekaragaman hayati di wilayah tambang. Limbah tambang, seperti *tailings* yang mengandung bahan beracun, dapat mencemari sungai dan tanah di sekitar tambang, merusak ekosistem lokal dan sumber air masyarakat. Proses pengolahan nikel juga sering menggunakan energi fosil, seperti batu bara, yang meningkatkan emisi gas

rumah kaca. Selain itu, banyak perusahaan tambang belum maksimal dalam melakukan reklamasi lahan pasca-tambang, meninggalkan lahan kritis yang tidak produktif. Hal-hal tersebut di atas bertentangan dengan prinsip perlindungan lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan dan target Indonesia untuk mencapai *net zero emissions* pada 2060.

Laporan dari Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) menunjukkan bahwa praktik investasi China di Sulawesi Tengah telah mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah, termasuk peningkatan emisi karbon akibat penggunaan teknologi yang rakus energi seperti RKEF (Rotary Kiln Electric Furnace) dalam proses pengolahan nikel. Pembangunan smelter dan infrastruktur terkait sering kali diiringi dengan pencemaran air dan udara, yang berdampak pada kesehatan masyarakat. Misalnya, ledakan yang terjadi di salah satu smelter di Kawasan Industri Morowali menewaskan 21 orang dan melukai banyak lainnya, menunjukkan risiko tinggi terhadap keselamatan kerja. Aktivitas PLTU Captive PT Stardust Estate Investment (SEI) di Morowali Utara berdampak buruk pada masyarakat Tanauge, dalam bentuk penyakit kulit dan infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), mulai dari anak-anak hingga orang dewasa (Wicaksono, 2024).

2) Dampak Sosial

Pengambilalihan lahan untuk pertambangan sering menimbulkan konflik, baik karena ketidaksesuaian kompensasi maupun relokasi paksa masyarakat lokal. Investasi asing sering kali membawa pekerja dari negara asal, seperti China, sehingga mengurangi peluang kerja bagi masyarakat lokal. Selain itu, kondisi kerja yang tidak aman atau upah rendah bisa menjadi isu serius. Manfaat ekonomi dari investasi sering kali tidak terdistribusi merata, sehingga masyarakat di sekitar tambang tetap miskin meskipun sumber daya alam mereka dieksploitasi. Masuknya investasi asing sering mengabaikan nilai-nilai budaya lokal, yang dapat mengubah struktur sosial masyarakat secara negatif.

Di beberapa daerah seperti Morowali, perusahaan-perusahaan sering kali melakukan perampasan lahan secara paksa untuk keperluan tambang dan pembangunan smelter. Praktik ini menyebabkan petani kehilangan lahan pertanian mereka, yang berdampak pada ketahanan pangan dan mata pencaharian masyarakat. Contoh nyata dari dampak sosial akibat investasi nikel China ini adalah persoalan konflik agraria yang terjadi di kawasan PT Indonesia Huabao Industrial Park (IHIP), yang berlokasi di Kecamatan Bungku Barat, Morowali. Secara umum konsolidasi lahan oleh pihak perusahaan dilakukan dengan cara merampas secara paksa dengan melakukan penimbunan di atas irigasi yang merupakan sumber air untuk lahan pertanian (sawah) warga seperti yang terjadi di Desa Topogaro. Penimbunan yang dilakukan untuk pembangunan jalan *houling* perusahaan hingga akhirnya berdampak gagal panen bagi petani akibat kekeringan.

Praktik terselubung ini dilakukan oleh pihak perusahaan dengan tujuan menimbun irigasi tersebut agar petani berhenti melakukan aktivitas bertani. Sebanyak 115 orang nelayan yang kehilangan mata pencahariannya akibat tidak produktif lagi membudidayakan rumput laut. Hal tersebut diduga terjadi sejak PT IHIP melakukan penimbunan pantai di Desa Ambunu dan Tondo seluas 40 hektare (Wicaksono, 2024). Penelitian menunjukkan bahwa industri pengolahan nikel dapat menyebabkan kerugian hingga Rp 3,64 triliun (sekitar US\$234,84 juta) bagi petani dan nelayan dalam jangka waktu 15 tahun ke depan akibat pencemaran dan degradasi lingkungan (Syahni, 2024). Degradasi kualitas air dan tanah berdampak langsung pada produktivitas pertanian dan perikanan, yang merupakan sumber pangan dan mata pencaharian bagi banyak masyarakat lokal.

3) Dampak Ekonomi

Fokus pada ekstraksi sumber daya seperti nikel dapat menciptakan ketergantungan ekonomi yang rentan terhadap fluktuasi harga pasar global dan menghambat diversifikasi ekonomi Indonesia. Ekstraksi nikel yang masif berpotensi menghabiskan cadangan mineral Indonesia lebih cepat dari perkiraan, meninggalkan kerugian jangka panjang bagi generasi mendatang. Investasi asing sering kali tidak disertai transfer teknologi yang memadai, sehingga Indonesia tetap bergantung pada teknologi luar negeri tanpa pengembangan kapasitas lokal. Meskipun kebijakan hilirisasi nikel bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah, banyak pengamat ekonomi mencatat bahwa keuntungan dari investasi ini lebih banyak dinikmati oleh pihak asing.

Sebagai contoh, Indonesia hanya mendapatkan sekitar 30% dari keuntungan, sementara sisanya mengalir ke China, yang mendominasi kepemilikan smelter di dalam negeri. Pelarangan ekspor bijih nikel menyebabkan harga nikel di pasar domestik jatuh di bawah harga internasional, mengakibatkan penurunan penerimaan royalti dan pajak dari industri ini. Hal ini berpotensi mengurangi kontribusi sektor nikel terhadap pendapatan negara. Selain itu, data menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di wilayah-wilayah sentra nikel justru meningkat. Misalnya, di Sulawesi Tengah, angka kemiskinan naik dari 12,30% pada September 2022 menjadi 12,41% pada September 2023 (Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada investasi besar dalam sektor nikel, dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat lokal tidak sejalan dengan harapan.

Hal-hal di atas merupakan tantangan-tantangan yang muncul ditinjau dari perspektif pembangunan berkelanjutan dan ekonomi politik hijau. Ketergantungan yang tinggi pada investasi asing, terutama dari China, dapat membuat Indonesia rentan terhadap perubahan ekonomi global. Hal ini mengharuskan pemerintah untuk mencari diversifikasi investasi dari negara lain. Banyak perusahaan tambang China menggunakan teknologi yang mungkin tidak selalu sesuai dengan konteks lokal Indonesia. Penegakan regulasi lingkungan dan sosial juga dianggap lemah karena banyaknya indikasi korupsi dan ketidaktegasan pemerintah, membuat perusahaan tambang mengabaikan prinsip-prinsip keberlanjutan. Infrastruktur tambang sering dibangun tanpa memperhatikan dampak jangka panjang terhadap lingkungan atau masyarakat.

Sebagian besar nikel yang diekstrak digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasar global, seperti baterai kendaraan listrik, sementara manfaatnya di dalam negeri masih minim. Untuk mencapai tujuan keberlanjutan, diperlukan inovasi dalam teknologi pengolahan nikel yang lebih ramah lingkungan. Ini termasuk penggunaan energi terbarukan dalam proses produksi dan pengelolaan limbah yang lebih baik. Ketidakseimbangan antara eksploitasi sumber daya dan pemberdayaan masyarakat sering kali menimbulkan ketidakpuasan atau resistensi lokal. Investasi besar-besaran dari China juga menghadapi kritik terkait dampak sosial, seperti perampasan lahan dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah perlu lebih transparan dan bertanggung jawab terhadap dampak negatif dari investasi ini.

Prospek Investasi Nikel China Di Indonesia Era Presiden Prabowo Subianto Melihat Hasil Pembahasan

Untuk menganalisis prospek investasi nikel China di Indonesia pada era Presiden Prabowo Subianto, kita dapat mempertimbangkan berbagai aspek seperti kebijakan pemerintah, hubungan bilateral, dinamika pasar, dan tren geopolitik. Presiden Prabowo kemungkinan akan melanjutkan agenda hilirisasi mineral yang dimulai oleh

pendahulunya, dengan fokus pada peningkatan nilai tambah produk mineral di dalam negeri. Hal ini membuka peluang bagi investasi China, terutama di sektor pengolahan dan manufaktur berbasis nikel. Pemerintahan Prabowo mungkin akan memprioritaskan kebijakan yang mendorong investasi asing langsung (FDI) untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan industri strategis. Penyesuaian peraturan seperti perpajakan, perizinan, atau perlindungan investasi akan memengaruhi minat investor China.

Selama ini, Indonesia dan China memiliki hubungan bilateral yang erat melalui kemitraan strategis komprehensif. Hal ini memberikan dasar yang kuat bagi investasi, termasuk dalam sektor nikel. Proyek-proyek yang didukung oleh BRI (*Belt and Road Initiative*), seperti pengembangan kawasan industri nikel di Sulawesi, akan terus berlanjut atau bahkan diperluas di bawah pemerintahan baru. Dinamika geopolitik, termasuk ketegangan di Laut China Selatan, mungkin berdampak pada hubungan bilateral, meskipun sektor ekonomi dan investasi sering kali dipisahkan dari isu politik. Dengan meningkatnya permintaan baterai kendaraan listrik (EV), nikel menjadi komoditas strategis. Indonesia, sebagai produsen nikel terbesar di dunia, akan tetap menjadi fokus bagi China, yang memimpin pasar manufaktur baterai global. Kebijakan larangan ekspor bijih nikel Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan hilirisasi dapat mendorong perusahaan China untuk berinvestasi dalam fasilitas pemurnian dan produksi bahan baku baterai di dalam negeri.

Investasi besar China acapkali mendapat kritik terkait isu lingkungan dan dampak sosial, terutama di wilayah penambangan seperti Sulawesi. Pemerintah Prabowo perlu menangani isu ini untuk memastikan keberlanjutan proyek investasi. Sentimen anti-China di beberapa kalangan masyarakat Indonesia dapat menjadi hambatan, meskipun mungkin tidak signifikan di level kebijakan nasional. Investor China kemungkinan akan memantau stabilitas politik dan hukum Indonesia di bawah pemerintahan baru untuk menilai risiko investasi. Pemerintahan Prabowo dapat mendorong pengembangan ekosistem industri kendaraan listrik di Indonesia, termasuk kerja sama dengan China dalam rantai pasok baterai dan teknologi EV. Untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, Indonesia mungkin memperluas kerja sama dengan mitra lain selain China, yang bisa memengaruhi posisi strategis investor China di sektor nikel. Prospek investasi nikel China di Indonesia pada era Presiden Prabowo cukup menjanjikan, terutama dengan tren global yang mendukung permintaan nikel untuk baterai EV. Namun, keberhasilan investasi ini akan sangat tergantung pada kebijakan pemerintah yang mendukung investasi asing, mitigasi dampak lingkungan, serta pengelolaan hubungan bilateral secara strategis.

Kesimpulan dan Saran

Hilirisasi nikel diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk, yang dinyatakan oleh Presiden Jokowi bahwa nilai ekspor nikel hasil hilirisasi meningkat signifikan dibandingkan dengan ekspor bijih mentah. Namun, kritik muncul mengenai apakah keuntungan tersebut benar-benar dirasakan oleh Indonesia atau justru lebih banyak dinikmati oleh China. Secara keseluruhan, meskipun investasi nikel China di Indonesia menawarkan potensi ekonomi yang besar, dampak negatifnya terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi lokal sangat signifikan. Untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, perlu ada evaluasi ulang terhadap kebijakan investasi serta penerapan regulasi yang lebih ketat untuk melindungi hak-hak masyarakat dan lingkungan hidup. Pemerintah harus mempertimbangkan moratorium pada proyek-proyek baru sampai masalah-masalah ini dapat diatasi secara efektif. Implementasi konsep pembangunan berkelanjutan dalam investasi nikel China di Indonesia memerlukan keseimbangan

antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Meskipun ada potensi besar untuk meningkatkan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja, tantangan terkait dampak sosial dan lingkungan harus ditangani secara serius agar investasi ini berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Pemerintah Indonesia perlu meningkatkan kerja sama bilateral dengan China untuk memastikan transfer teknologi ramah lingkungan. Selain itu perlu ada pembentukan tim independen untuk memantau implementasi proyek secara berkala. Di level *grassroot*, perlu adanya edukasi masyarakat lokal tentang dampak investasi dan memberikan platform partisipasi untuk menyuarakan kepentingan mereka. Pemerintah perlu memanfaatkan hasil investasi nikel untuk membangun sektor ekonomi lain yang berkelanjutan, sehingga mengurangi ketergantungan pada ekstraksi sumber daya. Hal lain yang tidak kalah penting untuk dipastikan adalah kepatuhan perusahaan tambang pada standar lingkungan dan sosial, termasuk reklamasi lahan dan pemberdayaan masyarakat lokal, misalnya dengan penggunaan dana dari investasi tambang untuk mengembangkan sektor-sektor lain yang berkelanjutan di wilayah terdampak. Masyarakat lokal juga harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait aktivitas tambang dan memastikan hak-hak mereka dilindungi. Di sisi lain, akuntabilitas dapat ditingkatkan dengan keterbukaan akses informasi terkait perjanjian investasi dan dampaknya terhadap masyarakat. Dengan implementasi yang tepat, investasi nikel China di Indonesia dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan sambil tetap menghormati prinsip-prinsip lingkungan dan sosial.

Daftar Pustaka

- ARC Group. (2024). Investment Outlook, Indonesia 2024 - ARC Group. Diakses dari <https://arc-group.com/investment-outlook-indonesia-2024/>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah. (2023). *Persentase Penduduk Miskin Di Sulawesi Tengah Pada Maret 2023 Naik Menjadi 12,41 Persen*. Diakses dari <https://sulteng.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/1099/persentase-penduduk-miskin-di-sulawesi-tengah-pada-maret-2023-naik-menjadi-12-41-persen.html>
- BIRO PERS, MEDIA, DAN INFORMASI SEKRETARIAT PRESIDEN. (2024). Presiden Jokowi: Hilirisasi Nikel dan Sumber Daya Alam Jadi Kunci Peningkatan Ekonomi Nasional. Diakses dari <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/presiden-jokowi-hilirisasi-nikel-dan-sumber-daya-alam-jadi-kunci-peningkatan-ekonomi-nasional/>
- Blanchflower, T. M. (2018). Leavy, P. (2017). *Research Design: Quantitative, Qualitative, Mixed Methods, Arts-Based, and Community-Based Participatory Research Approaches*. New York, NY: The Guilford Press. ISBN 9781462514380. 300 pp. (Paperback). *Family and Consumer Sciences Research Journal*, 47(1), 101–102. Diakses dari <https://doi.org/10.1111/fcsr.12276>
- CEICdata.com. (2023). China Outward Investment: Asia: Indonesia. Diakses dari <https://www.ceicdata.com/en/china/outward-direct-investment-by-country/outward-investment-asia-indonesia>
- Center for World Trade Studies UGM. (2022). *Industri nikel Indonesia pasca sengketa perdagangan dengan Uni Eropa*. Center for World Trade Studies UGM. Diakses dari <https://cwts.ugm.ac.id/2022/11/03/industri-nikel-indonesia-pasca-sengketa-perdagangan-dengan-uni-eropa/>

- Fauziyyah, P. Z., & Paksi, A. K. (2023). DAMPAK KERJA SAMA INDONESIA-CHINA DALAM PROYEK INVESTASI NIKEL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KEDUA NEGARA. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 7(1), 86–105. Diakses dari <https://doi.org/10.38043/jids.v7i1.4279>
- Freindensan, D. (2017). *DIPLOMASI YANG DILAKUKAN OLEH INDONESIA TERHADAP KLAIM REPUBLIK RAKYAT CHINA (RRC) DI LAUT CHINA SELATAN (KEPULAUAN NATUNA)*. Diakses dari <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/17371>
- Gading, S. (2024). Investor China Ramai-ramai Investasi Nikel di RI, Ini Buktinya. *Detikfinance*. Diakses dari <https://finance.detik.com>
- Griffith Asia Institute. (2024). China's investment in the Asia Pacific: 2023 report. Diakses dari https://blogs-griffith-edu-au.translate.google.com/asiainsights/chinas-investment-in-the-asia-pacific-2023-report/?x_tr_sl=en&x_tr_tl=id&x_tr_hl=id&x_tr_pto=tc#edn18
- Kemendag RI. (2024). Perkembangan Ekspor Non Migas (Negara Tujuan) - Satu Data Perdagangan Kemendag RI. Diakses dari <https://satudata.kemendag.go.id/data-informasi/perdagangan-luar-negeri/ekspor-non-migas-negara>
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2020). Hilirisasi Nikel Ciptakan Nilai Tambah dan Daya Tahan Ekonomi. Diakses dari <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/hilirisasi-nikel-ciptakan-nilai-tambah-dan-daya-tahan-ekonomi>
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2023). *Potensi menjanjikan, nikel RI bakal laris manis pikat investor*. Retrieved from <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/potensi-menjanjikan-nikel-ri-bakal-laris-manis-pikat-investor->
- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. (2023). *Hilirisasi nikel sebagai langkah awal transformasi dan akselerasi perekonomian Indonesia*. Retrieved from <https://maritim.go.id/detail/hilirisasi-nikel-sebagai-langkah-awal-transformasi-dan-akselerasi-perekonomian-indonesia>
- Metriani, Y. (2024). Vale Indonesia dan GEM Tandatangani Kolaborasi untuk Investasi Produksi Nikel Net-Zero di Forum Bisnis Indonesia-China. Diakses dari <https://investor.id/international/379670/vale-indonesiadan-gem-tandatangani-kolaborasi-untuk-investasi-produksi-nikel-netzerodi-forum-bisnis-indonesiachina>
- Muliawati, F. (2023). Banyak Pabrik Nikel RI Dibangun Investor China, Ini Alasannya. Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230818143716-4-464117/banyak-pabrik-nikel-ri-dibangun-investor-china-ini-alasannya>
- Nurmutia, E. (2024). Punya Dampak Besar, Ini Bukti Nyata Manfaat Hilirisasi di RI. Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240621104109-4-548089/punya-dampak-besar-ini-bukti-nyata-manfaat-hilirisasi-di-ri>
- Putra, T. S. A. (2022). *Gugatan Uni Eropa di World Trade Organization (WTO) mengancam hilirisasi industri pertambangan di Indonesia*. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/15503/Gugatan-Uni-Eropa-di-World-Trade-Organization-WTO-Mengancam-Hilirisasi-Industri-Pertambangan-di-Indonesia.html>

Dampak Investasi Nikel China Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Pembangunan Berkelanjutan dan Ekonomi Politik Hijau

- Ravindran, V. (2019). Data analysis in qualitative research. *Indian Journal of Continuing Nursing Education*, 20(1), 40. Diakses dari https://doi.org/10.4103/ijcn.ijcn_1_19
- Rosada, F., Wibisana, R. a. A., & Paksi, A. K. (2023). The Impact of Indonesia-China Nickel Cooperations on Indonesia's Economy and Environment. *Nation State Journal of International Studies*, 6(2), 96–116. Diakses dari <https://doi.org/10.24076/nsjis.v6i2.1270>
- Rosada, F. (2024). *PENGARUH INVESTASI TIONGKOK DALAM INDUSTRI NIKEL TERHADAP KEBIJAKAN EKSPOR NIKEL INDONESIA*. Skripsi Sarjana, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Diakses dari <https://etd.umy.ac.id/id/eprint/47691/>
- Santika, E. F. (2023). *Pemerintah berambisi bangun 53 smelter pada 2024, ini rinciannya*. Databoks. Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/pertambangan/statistik/347bacb4da6cbfo/pemerintah-berambisi-bangun-53-smelter-pada-2024-ini-rinciannya>
- Simatupang, H. Y. (2023). PROGRESS AND PROSPECTS: PRESIDENT JOKOWI'S MARITIME DIPLOMACY AND GLOBAL MARITIME FULCRUM. *Dinamika Global: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 8(2), 174-191. <https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jdg.v8i2.1888>
- Sutrisno, E. (2023). Nilai Ekspor Hilirisasi Nikel Melonjak 745%. Diakses dari <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/7255/nilai-ekspor-hilirisasi-nikel-melonjak-745?lang=1>
- Syahrani, M. (2024). Vale dan Perusahaan Cina Teken Investasi Proyek Smelter Nikel HPAL Rp 21,9 T. *Katadata*. Diakses dari <https://katadata.co.id/berita/energi/67318d8412281/vale-dan-perusahaan-cina-teken-investasi-proyek-smelter-nikel-hpal-rp-21-9-t>
- Syahni, D. (2024). *Keuntungan Ekonomi Hilirisasi Nikel Hilang Terlibas Dampak Negatif*. Diambil dari <https://www.mongabay.co.id/2024/04/16/keuntungan-ekonomi-hilirisasi-nikel-hilang-terlibas-dampak-negatif/>
- Utami, R. (2015). Hubungan Indonesia-Tiongkok dari Soekarno hingga Jokowi. Diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/490460/hubungan-indonesia-tiongkok-dari-soekarno-hingga-jokowi>
- Wicaksono, R. A. (2024). *Banyak Masalah Investasi Nikel China Di Sulteng, Riset WALHI*. Retrieved from <https://betahita.id/news/detail/10504/banyak-masalah-investasi-nikel-china-di-sulteng-riset-walhi.html?v=1723542819>
- Wijaya, A. (2020). Pengamat: Investasi China di Indonesia berkontribusi positif. *Antara News*. Diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/1698754/pengamat-investasi-china-di-indonesia-berkontribusi-positif>
- Wulandari, D. A., & Inayah, A. (2021). The Impact of China's Belt and Road Initiative on Indonesia's Export to China. *Journal of World Trade Studies*, 6(1), 1–14. <https://doi.org/10.22146/jwts.v6i1.1038>